

Judul : Transisi Energi Terkendala Biaya
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Eksekusi Lambat Transisi Energi Terkendala Biaya



Rusli Habibie

ANGGOTA Komisi XII DPR Rusli Habibie mendorong Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempercepat pelaksanaan transisi energi. Terlebih, arah kebijakan sudah tegas tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Rusli bilang, hingga hari ini sekitar 66 persen pasokan listrik nasional masih ditepang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara sebagai pembangkit baseload. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Padahal tuntutan global dan komitmen nasional mengharuskan percepatan energi bersih.

"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar dan dapat menjadi alternatif *baseload* di masa depan," kata Rusli dalam keterangannya. Minggu (16/11/2025).

Ia mencontohkan potensi panas bumi dan energi angin di Provinsi Gorontalo yang belum dimanfaatkan secara optimal. "Panas bumi, dengan sifatnya yang dapat beroperasi stabil 24 jam, adalah salah satu calon kuat pengganti batu bara," jelasnya.

Namun, kata Rusli, harga keekonomian panas bumi kurang kompetitif dan belum menarik bagi investor. Hal ini perlu diatasi agar panas bumi bisa menjadi tulang punggung pembangkit baseload yang bersih. "Kita harus menemukan formula keekonomian yang tepat supaya proyeknya feasible (berhasil) dan tidak membebani masyarakat," tegas Anggota Fraksi Golkar ini.

Rusli menambahkan, potensi EBT tidak hanya berada di Gorontalo, tetapi juga tersebar di berbagai daerah lain di Indonesia. Seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Semua potensi tersebut harus diintegrasikan dan diakselerasi untuk mengejar target bauran energi dalam RUPTL, khususnya periode 2029-2034.

Untuk itu, Rusli meminta Kementerian ESDM dan PLN

melakukan pemetaan ulang secara lebih progresif terhadap proyek-proyek EBT. Caranya, dengan mempercepat perizinan, studi kelayakan, hingga percepatan konstruksi. Tujuannya, agar target transisi energi tidak sekadar menjadi rencana di atas kertas. "Kalau kita ingin transisi energi berjalan cepas, eksekusinya harus lebih agresif," tegasnya.

Dia mengingatkan, jangan biarkan potensi besar di daerah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus menggerakkan ini dengan lebih serius.

"Percepatan ini akan memperkuat ketahanan energi, membuka peluang investasi, serta membawa manfaat langsung bagi masyarakat daerah yang memiliki potensi energi bersih," harap legislator asal Gorontalo ini.

Bagaimana tanggapan PLN? Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PT PLN Evy Haryadi memastikan, RUPTL 2025-2034 akan jauh lebih hijau dibandingkan dengan sebelumnya. Bila sebelumnya perusahaannya hanya akan membangun sekitar 21 gigawatt (GW) energi terbarukan, kini kapasitas tersebut meningkat menjadi sekitar 52,9 gigawatt selama periode 2025-2034.

"Selain memperluas pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), kami juga berupaya menurunkan emisi dari pembangkit eksisting," ujar Evy dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

PLN, kata Evy, akan mengembangkan berbagai mekanisme pembiayaan karbon sebagai sumber pendanaan inovatif untuk mempercepat transisi energi. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi hijau sekaligus mewujudkan sistem kelistrikan yang rendah emisi. "Upaya ini berjalan seiring dengan pengembangan *Smart Grid* yang memungkinkan integrasi lebih luas energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional secara efisien dan andal," jelas dia.

Diketahui, *smart grid* adalah jaringan listrik modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola produksi dan distribusi listrik secara efisien, andal, dan berkelanjutan.

Selain itu, Evy menekankan potensi ekspansi energi terbarukan PLN berpotensi menghasilkan hingga 250 juta ton sertifikat pengurangan emisi. Hal ini, bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang nyata untuk menciptakan nilai ekonomi hijau dan mempercepat transisi energi nasional. ■ TIF

Speaker Quote

Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar dan dapat menjadi alternatif *baseload* di masa depan.

Rusli Habibie, Anggota Komisi XII DPR